Sri Haryani Gantikan Danang

SLEMAN (KR) - Dra Hj Sri Haryani MSi bakal calon pengganti Danang Maharsa SE di DPRD Sleman yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil bupati. Sedangkan untuk proses Pergantian Antar Waktu (PAW) masih menunggu surat usulan pemberhentian Danang Maharsa dari DPP PDI Perjuangan.

Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta menjelaskan, minggu kemarin telah menerima surat balasan dari KPU Sleman tentang PAW dari Danang Maharsa. Dalam surat itu, KPU menyebutkan Dra Sri Haryani nantinya sebagai calon pengganti Danang Maharsa. "Pengganti ini merupakan caleg yang memperoleh suara terbanyak setelah Danang Maharsa dalam Pileg kemarin. Tentunya itu berdasarkan penghitungan di KPU," ujarnya kepada *KR*, Rabu (23/9).

Menurut Haris, untuk proses PAW ini masih kurang surat usulan pemberhentian Danang Maharsa dari DPP PDI Perjuangan. Setelah surat itu diterima, DPC PDI Perjuangan Sleman mengajukan usulan PAW ke DPRD Sleman. "Jadi kami masih menunggu surat usulan pemberhentian dari DPP dan usulan PAW dari DPC. Kalau itu sudah dikirim ke dewan, kami baru kirim ke Bupati Sleman untuk diteruskan ke Gubernur DIY," terangnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sleman Koeswanto SIP mengaku, secara resmi telah mengirimkan surat ke DPP mengenai usulan pemberhentian. **(Sni)-f**

Warga Jomboran Tolak Penambangan dengan Alat Berat

MINGGIR (KR) - Warga Jomboran XV Sendangagung Minggir Sleman menolak penambangan pasir dengan alat berat di Sungai Progo, dusun setempat. Penolakan menyusul rencana penambangan oleh PT Citra Mataram Konstruksi (CMK) yang telah mengantongi izin.

Warga Jomboran, Jonson mengatakan, banyak dampak buruk yang ditimbulkan akibat penambangan dengan alat berat. Dari sisi lingkungan, kondisi tanah di Dusun Jomboran khususnya yang berada di wilayah aliran Sungai Progo sangatlah labil. Hal itu terbukti dengan telah menghilangnya tanah warga yang berada di tepi aliran sungai.

"Kemudian soal air tanah. Dulu dusun kami kaya akan sumber air, sekarang di beberapa bagian di dusun kami mulai krisis air," ungkap Jonson kepada wartawan di sela koordinasi dan sosialisasi di kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Rabu (23/9).

Jonson juga menyoroti terkait izin yang sudah dikantongi oleh PT CMK. Apalagi sejauh ini, belum ada sosialisasi dan tidak mengetahui dokumen sosialisasi warga oleh PT CMK. "Mayoritas warga Jomboran menolak penambangan dengan alat berat. Kami heran jika ada warga yang setuju penambangan dengan alat berat. Apalagi, PT CMK ini sudah melakukan penambangan di sebelah dusun kami dan menyisakan kondisi lingkungan yang memprihatinkan," ungkap Jonson didampingi warga lainnya, Iswanto.

Sedangkan kuasa hukum PT CMK Yacob SH menegaskan, kliennya sudah mengantongi legalitas penambangan. Bahkan sudah melakukan sosialisasi sebanyak 4 kali kepada warga dan ada beberapa poin kesepakatan dengan warga, antara lain PT CMK bersedia memberikan dana kompensasi terkait aktivitas penambangan dan pengaturan jam operasional alat berat. "Perusahaan juga bersedia bertanggungjawab jika terjadi kerusakan tanah akibat penambangan," tandasnya. **(Ayu)-f**

KR- Wahyu Priyanti.

Warga Jomboran XV dan pihak terkait saat koordinasi di BBWS Serayu Opak.

Wabup Dukung Pembukaan Desa Wisata

SEYEGAN (KR) - Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengajak para pelaku wisata tetap optimis mengelola wisata tanpa menunggu pandemi berakhir. Tentu hal itu dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

"Kita semua tidak ada yang tahu, sampai kapan pandemi ini terjadi. Jangan hanya menunggu, kita harus menyesuaikan dengan kondisi," kata Sri Muslimatun saat meninjau Desa Wisata Grogol di Kalurahan Margodadi Kapanewon Seyegan, Rabu (23/9).

Sembari berkeliling di kawasan wisata alam seluas lebih dari 3 hektare tersebut, Sri Muslimatun memberi semangat agar pelaku wisata tetap produktif. Caranya dengan penyediaan fasilitas protokol kesehatan, promosi dan perawatan lingkungan.

KR-Istimewa

Wabup Sri Muslimatun berkeliling di Desa Wisata Grogol.

"Harapannya Desa Wisata Grogol tidak mangkrak," ujarnya.

Sri Muslimatun juga mengapresiasi peraturan Desa Wisata bahwa pengunjung yang berbuat asusila terancam denda Rp 2 juta. Aturan ini bentuk konsistensi warga merawat nilai-nilai positif serta moralitas yang baik. "Apa yang dilakukan pengelola Desa Wisata patut didukung. Saya merasa selain Desa Wisata, kawasan ini juga dapat disebut sebagai wisata moral," ujarnya.

Sementara pihak pengelola, Bugiman mengaku, efek pandemi sangat terasa bagi pengelola dan warga. Namun pengelola optimis penyesuaian wisata di masa pandemi akan membangkitkan ekonomi wisata. "Kami harus berbenah untuk menarik kunjungan wisatawan," tandasnya. **(Has)-f**

HARI INI PENGUNDIAN NOMER URUT

Sah, KPU Sleman Tetapkan Tiga Paslon

SLEMAN (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menetapkan tiga bakal pasangan calon (bapaslon) bupati dan wakil bupati usai rapat pleno yang diadakan secara tertutup, Rabu (23/9). Usai ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati, KPU Sleman akan melakukan pengundian nomor urut Pilkada 2020, Kamis (24/9) hari ini.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi menerangkan, ketiga bapaslon yang sebelumnya mendaftar dipastikan sah. Pilkada Sleman 2020 diikuti pasangan Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa, Sri Muslimatun-Amin Purnama dan Danang Wicaksana Sulistya-Agus Choliq. Keputusan ini tertuang dalam SK KPU Sleman Nomor 54/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2020. Surat tertanggal 23 September 2020 ini menyatakan ketiga bakal pasangan calon telah memenuhi segala persyaratan. Sehingga telah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman.

"Kelima anggota (KPU Sleman) dalam kondisi sehat dan telah melakukan rapat pleno. Sepakat bulat ketiganya telah memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai pasangan calon, sudah lengkap dan sah. SK sudah kami sampaikan ke ketua Paslon," kata Trapsi Hariyadi di Kantor KPU Sleman, Rabu (23/9).

Menurut Trapsi, setelah ditetapkan sebagai paslon, KPU Sleman akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon. "Rencananya digelar di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman. Dalam tahapan ini jumlah peserta dibatasi. Sebagai syarat penerapan protokol Covid-19," jelasnya.

Setiap pasangan calon dan tim juga akan mengikuti deklarasi kampanye damai. KPU juga telah memberikan imbauan agar tidak membawa massa saat pengundian nomor urut Pilkada Sleman 2020. "Setiap pasangan calon dan tim sukses agar mematuhi imbauan yang berlaku. Kedatangan dibatasi di antaranya masing-masing pasangan calon. Serta 2 orang perwakilan partai politik, 1 orang liaison officer (LO) dan 2 orang tim kampanye," ungkap Trapsi. **(Aha)-f**

Tracing Klaster Pasar Cebongan Dihentikan

SLEMAN (KR) - Dinas Kesehatan Sleman telah melakukan tracing terhadap klaster Pasar Cebongan dan ditemukan 26 orang positif Covid-19. Agar klaster di pasar tidak terjadi lagi, Dinas Kesehatan berencana melakukan rapid test massal lagi di lingkungan pasar.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo mengatakan, hingga Sabtu (19/9) total ada 26 orang positif Covid-19 dari tracing klaster Pasar Cebongan. Dari jumlah tersebut, 13 orang adalah pedagang, sedangkan 13 lainnya merupakan keluarga dari pedagang yang melakukan kontak erat.

Menurut Joko, dengan tidak adanya kasus baru, Dinkes Sleman telah menghentikan upaya tracing klaster Pasar Cebongan. "Tracing dirasa cukup dan tidak perlu dilakukan lagi karena sejak tangga 19 September, tidak lagi ditemukan kasus baru. Orang yang melakukan kontak dengan positif Covid-19, telah melakukan rapid test dan memiliki hasil non reaktif," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (23/9).

Joko menegaskan, agar klaster di pasar tidak terjadi lagi, Dinkes Sleman berencana melakukan skrining di pasar lainnya. **(Aha)-f**

KR-Franz Boedisukarnanto

RAPID TEST: Petugas Puskesmas Depok II Sleman melakukan rapid test Covid-19 massal terkait dengan zona merah di wilayah Padukuhan Pringwulung Condongcatur Depok Sleman, Rabu (23/9) di Balai Padukuhan Pringwulung. Dukuh Pringwulung Sahid Fahrudin (berdiri) mengatakan, rapid test ini dilakukan untuk memutus matarantai penularan Covid-19.

Rehab Jembatan Merah Tertunda

SLEMAN (KR) - Rehab Jembatan Merah yang direncanakan dilaksanakan tahun 2021 harus tertunda. Mengingat banyak anggaran proyek selama tahun 2020 dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sedangkan pembebasan lahan rencananya tahun ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Taufik Wahyudi ST MTP menjelaskan, seharusnya pembangunan rehab Jembatan Merah dilaksanakan tahun 2021. Namun karena Covid-19, pelaksanaan kemungkinan tahun 2022. "Tahun 2021, anggaran digunakan untuk proyek yang seharusnya dilaksanakan tahun ini. Soalnya tahun ini banyak proyek yang tertunda. Akibatnya proyek ditunda tahun 2022," jelasnya.

KR-Saifullah Nur Ichwan

Kendaraan roda dua masih melintas di jembatan.

Menurut Taufik, Jembatan Merah di Depok ini kondisinya memang sudah rusak karena sudah lama. Bahkan sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan roda empat. Sedangkan untuk roda dua masih bisa melintas. **(Sni)** -f